REFORMULASI KHITTAH 1926

Surabaya Post, Kamis 18 Maret 2010

Oleh: Abd. Ala

Kabar burung yang beredar, ada elit Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin mencalonkan diri dalam bursa ketua tanfidziyah Pengurus Besar (PBNU) yang mulai menggunakan cara-cara yang tidak elok. Misalnya dengan menggunakan upaya implisit atau eksplisit yang mengarah kepada "pembelian" suara. Terlepas benar tidaknya isu tersebut, namun yang jelas, posisi dan jabatan NU mulai menjadi rebutan. Mereka memperebutkan jabatan tampaknya bukan ingin mengabdi kepada organisasi dan masyarakat, tapi lebih merupakan dorongan untuk meraih kekuasaan yang terkait dengan kepentingan sempit dan sejenisnya.

Jujur saja, akhir-akhir ini upaya meraih kekuasaan melalui organisasi yang didirikan tahun 1926 itu memang tampak mengental ke permukaan. Sepak terjang politis sebagian elit dari tingkat cabang sampai pengurus besar dengan mudah dapat ditangkap dengan mata telanjang. Akibat politisasi ini, NU kian hari kian tampak kerdil. Keberadaannya kurang bermakna lagi bagi warga, bangsa, dan negara.

Pada sisi itu, Muktamar NU ke-32 di Ujung Pandang perlu menyikapinya secara arif dan tegas serta solutif. Salah satu upaya untuk itu adalah reformulasi Khittah 1926.

Pembiasan Khittah 1926

Dalam khittah –memodifikasi kutipan van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1994:127-128) –disebutkan, hak politik merupakan salah satu hak asasi warga negara, termasuk warga NU. Namun NU bukan wadah bagi kegiatan politik praktis. Terkait dengan itu, penggunaan hak politik dilakukan sesuai dengan perundangan yang ada dan dilaksanakan dengan al-akhlak al-karimah yang bernilai Islam dalam rangka terciptanya kebudayaan politik yang sehat. Dengan demikian, NU menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tekstualitas khittah yang singkat dan hanya memuat pokok-pokok pikiran dasar tentang politik memberi peluang besar bagi terjadinya perbedaan atau bahkan pembiasan pemahaman, dan sekaligus dimungkinkan untuk ditafsirkan secara simplistik dan dimaknai secara serampangan. Sebagian elit dengan berlindung di balik Khittah 1926, justru memobilisasi massa atau bahkan membodohi warga untuk kepentingan pragmatis.

Korban yang paling merasakan dari semua itu adalah massa NU di akar rumput. Akibat ulah sebagian elit NU, ketajaman hati nurani warga nahdliyin menjadi tumpul. Lebih dari itu, organisasi yang selama ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dari segala keterbelakangan yang membelit mereka telah berubah bentuk seakan-akan menjadi lembaga yang koersif. Ia telah memaksakan kepada warganya pilihan-pilihan yang secara moral dan nilai-nilai agama substantif sulit dicari pertanggung-jawabannya. Massa di lapisan paling bawah tak lebih dari semacam bola yang ditendang ke sana ke mari. Mereka hanya sekadar menjadi abdi yang disuruh-suruh sesuai dengan kehendak beberapa petinggi mereka.

Keberlangsungan kondisi itu tentu sangat tidak menguntungkan bagi NU dan warga nahdliyin. Pembiaran hal itu akan menjadikan NU tidak akan mampu mengemban misi politik kenegaraan, kebangsaan da kerakyatan yang bertujuan untuk membangun suatu negara kesatuan yang kokoh, dan sekaligus memberdayakan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan mereka.

Reformulasi

Berdasarkan hal itu, NU perlu melakukan suatu terobosan yang bukan sekadar memuaskan semua pihak, tapi yang lebih penting menyelamatkan NU dari tarikan-tarikan kepentingan kekuasaan sesaat yang akan merugikan organisasi dan komunitas NU saat ini dan masa depan. Dalam konteks itu, jam'iyah sosial-keagamaan ini dituntut untuk merujuk kembali ke Khittah 1926 dan memaknainya secara utuh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan latar belakang dan semangat Khittah sendiri. Pemaknaan secara utuh, liberatif dan mencerahkan sangat urgen untuk segera dilaksanakan untuk menghindari tarikan politis dalam beragam bentuknya yang berkembang saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reformulasi khittah tentu tidak dapat dilakukan secara asal-asalan atau hanya dilakukan oleh kelompok tertentu saja. Para tokoh yang terlibat dalam usaha pemulihan khittah pada tahun 1983 lalu yang disebut Majelis-24 –semisal KH Sahal Mahfudz, A Ghaffar Rahman, Tolhah Hasan dan Masdar F. Masudi –, dan Tim Tujuh –seperti Ahmad Bagja –, serta para ulama, kaum intelektual, anak muda, pimpinan dan sebagainya yang dapat merepresentasikan segenap elemen dan warga NU perlu dilebatkan secara aktif dan didengar pendapatnya. Melalui pelibatan yang representatif, semangat, makna, dan tujuan hakiki dari khittah akan terumuskan secara otentik, konkret, dan transparan.

Melalui pemaknaan itu, NU diharapkan tidak dapat ditarik-ulur untuk kepentingan sesaat, dan dibiaskan menjadi mesin politik kekuasaan yang praktis dan pragmatis. Demikian pula, meulai reformulasi itu, orang-orang yang hanya ingin mencari jabatan di NU atau menjadikan NU sebagai alat dan batu loncatan untuk kepentingan di luar kepentingan NU dan masyarakat diharapkan tidak memiliki peluang untuk masuk dalam jajaran kepengurusan di berbagai tingkatannya.

Kita yakin, di dalam NU masih banyak figur yang benar-benar ingin mengabdi untuk membesarkan organisasi dan untuk kepentingan warga, bangsa, dan negara. Dari mereka ini, kita mengharapkan kiprah nyata yang bisa menyelamatkan organisasi dari inertia yang akhir-akhir ini menggelutinya. Semoga Muktamar NU ke-32 yang berlangsung dari 22 sampai 27 Maret 2010 ini akan menghasilkan yang terbaik bagi NU, warga, bangsa dan negara©.

* Warga NU kultural. Saat ini sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan SDM IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id